

VISI KEAGAMAAN DI INDONESIA DI MASA DEPAN

P. Tongli

International Mission Centre (IMC) Universitas
Kritsten Inonesia Paulus (UKIP) Makassar

Abstract;

This writing depicts the future vision of religion in Indonesia. The methodology of the writing is using futurology analyzes to predict the condition of Indonesian religion in the future. Religion is one of the crucial problems in society and state, because it has role at living humanity. When religion to be harmony, the state and society harmony too. Meanwhile, the state is not harmony when religion or its followers are not harmony. The social involvement have to be undertaken the cooperation of religious as institution to promote justice, equal right, and prosperity. Therefore, the most important aspect that has to be promoted in Indonesia is not religious flash, but solidarity in promoting justice and prosperity.

Keywords; Agamanisasi Negara – Politisasi Agama - Toleransi

I. Pendahuluan

Konsep tentang negara Indonesia sesuai dengan proses terbentuknya, merupakan konsep negara kesatuan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan yang berpangkal dari rasa solidaritas karena nasib dan isi perjuangan yang sama. Oleh karena itu untuk mempertahankan kesatuan bangsa ini konsep ini tidaklah boleh dilupakan. Semua unsur yang ada termasuk keputusan-keputusan konkrit yang dimaksudkan memajukan bangsa ini harus kita arahkan kepada kesatuan itu. Maka berbicara tentang masa depan Indonesia tidak lain daripada berbicara tentang daya upaya menjaga unsur-unsur yang mempersatukan suku-suku bangsa yang membentuk Indonesia ini.

Di sini kita akan berbicara tentang salah satu pilar yang sangat menentukan dalam kehidupan bangsa kita, itulah agama. Pembicaraan kita bermaksud mencari visi keagamaan di masa mendatang. Karena suatu visi atau pandangan selalu merupakan akumulasi pengalaman-pengalaman dan cita-cita dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, maka pandangan keagamaan di masa mendatang mau tidak mau harus bercermin pada pengalaman masa lampau.

Hubungan yang baik antarumat beragama di Indonesia ini akan sangat menentukan pembangunan bangsa ini di masa yang akan datang. Kondisi di mana orang saling menganggap saudara dan saling mempercayai satu sama lain akan memungkinkan orang untuk memusatkan perhatian pada usaha

untuk memperbaiki kehidupan bersama, memajukan keadilan sosial, nilai-nilai moral dan akhirnya perdamaian dan kebebasan bagi semua orang. Lain halnya kalau kondisi ini tidak terbentuk, perhatian orang lebih diwarnai oleh kecurigaan satu terhadap yang lain. Dalam kondisi yang terakhir ini orang hanya akan saling mengamati, dan tidak akan pernah merasa sebagai bagian dari kebersamaan. Orang dapat hidup bersama, tetapi tidak pernah membentuk kebersamaan. Yang menjadi dasar hidup bersama hanyalah sekedar toleransi atau semacam gencatan senjata. Oleh karena itu masa depan Indonesia, sebagai negara yang terdiri dari kesatuan berbagai macam unsur termasuk agama, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita sekarang ini membangun persaudaraan sejati di antara semua warga negara.

II. Tantangan Terhadap Agama

Pemikiran kita tentang agama kadang terusik oleh konflik-konflik horisontal akhir-akhir ini yang tidak jarang menyeret serta agama kedalam substansi permasalahannya. Konflik horisontal tersebut mengancam penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan integrasi nasional. Konflik yang di Aceh, di Ambon, di Poso, atau juga yang kadang secara fluktuatif muncul di Papua dan Kalimantan, banyak diwarnai oleh anarki sosial dapat kita sebut sebagai contoh di sini. Kenyataan tersebut merangsang permenungan tentang makna dan peranan agama di negara yang diwarnai oleh pluralitas ini.

Kalau kita dengan jujur melihat hubungan antar agama di Indonesia, hubungan itu masih diwarnai oleh rasa curiga satu terhadap yang lain, sehingga yang satu dapat dipandang sebagai ancaman oleh yang lain. Kejadian-kejadian yang disebut di atas, atau pun yang terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, dst. masih segar dalam ingatan kita. Meskipun sekarang mungkin kita dapat melihat peristiwa-peristiwa tersebut dengan lebih tenang dan jernih, tetapi ketika peristiwa itu terjadi, dengan spontan muncul sikap saling mencurigai dan saling menuduh. Sikap positif juga masih dihambat oleh kesulitan-kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat atau pun dengan adanya publikasi-publikasi yang menyudutkan agama lain. Isu kristenisasi ataupun islamisasi adalah ungkapan yang sangat jelas dari sikap curiga tersebut. Apalagi akhir-akhir ini isu agama kadang juga diangkat di dalam kampanye untuk mendukung atau menyudutkan calon-calon tertentu.

Pengalaman-pengalaman semacam ini memang mempersulit pembangunan hubungan yang baik. Akan tetapi kecurigaan-kecurigaan yang ada haruslah dikesampingkan, kalau kita mau keluar dari hambatan relasi yang ada.

Banyak dari pengalaman-pengalaman itu tidak lepas dari salah paham yang sudah lama terdapat di antara kita. Prasangka aprioris mewarnai pandangan dan penilaian terhadap suatu soal tertentu, dan inilah sumber dari unsur salah paham dan saling tidak mengerti. Itulah sebabnya hal ini tidak dapat kita biarkan. Dibutuhkan kesediaan dari masing-masing pihak untuk

melepaskan pegangan aprioris tentang agama lain, yang mungkin selama ini diyakini sebagai benar dan mulai untuk menjalin hubungan dialogis.

III. Saling Menghormati Dalam Perbedaan

Salah satu kecenderungan orang dalam menghadapi keanekaragaman adalah menghilangkan perbedaan. Muncullah tuntutan dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain untuk mengikuti pandangan atau kehendaknya. Tetapi justru di sanalah pangkal dari konflik. Betapapun pandangan dan kehendak itu bersifat bebas. Selama masih tetap terjadi dominasi pihak tertentu terhadap pihak lain entah pihak mayoritas terhadap minoritas, atau pun sebaliknya dari pihak minoritas yang kebetulan kuat terhadap pihak mayoritas, selama itu pula yang akan terjadi adalah komunikasi yang tidak sejajar. Yang dominan akan merasa lebih unggul daripada yang lain dan yang lain selalu merasa dibatasi ruang geraknya.

Yang dibutuhkan dalam keanekaragaman agama seperti yang kita alami di Indonesia adalah:

Pertama: kesadaran bahwa kita memang berbeda, dan hal ini tidak mungkin kita hilangkan. Meskipun dasar dan tujuan akhir setiap agama akhirnya pastilah menunjuk hal yang sama, dan mungkin ada banyak kesamaan yang lain dalam hal-hal tertentu yang dapat kita cari, tetapi gambaran, pengertian dan penghayatan masing-masing agama pastilah berbeda. Tidak akan ada gunanya mengambil sikap seakan-akan semua agama sama saja, atau mau menyisihkan perbedaan dengan mengadakan semacam pembauran unsur-unsur dari berbagai macam agama (asimilasi). Sikap yang diharapkan muncul dalam suasana itu adalah kemauan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi bukan hanya membiarkan atau sekedar semacam gencatan senjata, tetapi lebih dalam arti positif, yakni menerima dengan tulus saudara dalam kekhasannya, bahkan dalam "kelainannya". Itulah sikap menerima yang lain sebagai yang lain, apa adanya. Penerimaan seperti itu mengandaikan pandangan positif terhadap agama lain dan pemeluk-pemeluknya, di mana masing-masing diakui sebagai orang atau kelompok yang dengan jujur mencari keselamatan dan meyakini sesuatu yang mendatangkan keselamatan baginya.

Kedua: interaksi antarpemeluk agama secara seimbang, artinya dalam interaksi sosial terjadi dialog yang sejajar, di mana tidak ada pihak yang merasa lebih berhak atau lebih unggul daripada yang lain, atau di mana tidak ada pihak yang merasa takut terhadap yang lain atau selalu merasa ditentukan oleh yang lain. Hanya dalam suasana dialogal yang sejajar, orang dapat mengungkapkan dirinya dengan penuh, jujur dan tanpa merasa ditekan atau diperalat.

IV. Peranan Negara

Tempat primer dari agama dan kepercayaan itu terletak di dalam batin manusia. Unsur luar hanyalah ungkapan dari unsur batiniah tersebut, atau dapat membantu menemukan unsur batiniah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebersamaan merupakan tempat sekunder bagi agama. Oleh karena itulah agama haruslah lebih banyak ditempatkan pada ruang privat sehingga semakin sedikit diatur dalam ruang publik. Pelaksanaan aturan agama hendaknya diserahkan kepada lembaga keagamaan untuk mengatur penganutnya. Pada ruang publik cukuplah kalau ada aturan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua penganut agama dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik tanpa benturan dengan penganut agama lain.

Untuk dapat terciptanya suasana seperti itu, negara diharapkan mempunyai posisi yang netral, tidak memihak atau memberi prioritas pada suatu agama tertentu. Hanya kalau negara menempatkan diri demikian, semua warga negara yang berbeda-beda agama dan kepercayaannya akan percaya kepada peranan negara dalam mengayomi semua warganya. Sebenarnya UUD 1945 telah merumuskan peranan negara ini dengan sangat jelas dalam pasal 29 ayat 2: "*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Peranan negara terletak pada menciptakan kondisi, di mana orang dapat dengan bebas memeluk agamanya dan dengan bebas beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Untuk menjaga netralitas negara berhadapan dengan agama-agama, peranan negara hendaknya terbatas pada hal menjaga ketentraman dan kebebasan warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadatnya.

V. Hubungan Negara - Agama

Agama dan negara adalah dua badan yang sama-sama otonom, masing-masing dengan otoritas, fungsi dan mekanismenya sendiri-sendiri. Namun disadari juga bahwa keterpisahan secara mutlak di antara kedua badan ini tidaklah mungkin, karena subyeknya sama: warga negara adalah juga sekaligus warga/penganut agama. Bagi orang beriman, kehidupan sosial termasuk kehidupan bernegara adalah medan perwujudan nilai-nilai moral yang disimpulkan dari imannya.

Menata hubungan agama negara adalah tugas abadi yang tidak pernah selesai. Tujuan dari penataan ini adalah untuk menghindari konflik di antara dua badan otonom ini, sekaligus menghindari kolusi kepentingan di antara keduanya. Kolusi inilah yang ingin dihindarkan, karena dampaknya jauh lebih destruktif: entah *agamanisasi negara* (negara diatur seakan-akan sebagai suatu lembaga keagamaan) atau *politisasi agama* (agama diperalat dan dijadikan tunggangan politik). Kedua eksekusi ini melenceng jauh dari hakekat agama itu sendiri.

Hubungan yang ingin dicapai adalah hubungan kemitraan yang setara, yang berasal dari sumber yang sama yaitu Allah dan mempunyai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan manusia. Maka di sini terdapat tanggung jawab timbal balik: Agama mempunyai tanggung jawab kenegaraan, antara lain dengan : (1) membina umatnya untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan (2) membantu dan mengingatkan negara untuk menjalankan fungsi kenegaraannya dengan bermoral.

Dan sebaliknya negara mempunyai tanggung jawab keagamaan, antara lain dengan: (1) menjamin rasa aman semua warga negaranya dalam menjalankan kehidupan keagamaan mereka dengan bebas; (2) dalam batas-batas wewenang yang dimilikinya, membantu semua agama untuk mengembangkan diri sebaik-baiknya; dan (3) memberi perlakuan dan perlindungan yang adil kepada semua agama yang ada, serta mengupayakan terwujudnya baik kebebasan maupun kerukunan beragama.

Agama akan menikmati manfaat yang maksimal dari perlindungan negara ketika negara mampu melaksanakan fungsi kenegaraannya dengan bebas dan otonom sebagai negara. Begitu negara terkooptasi sehingga hanya memprioritaskan salah satu agama saja, ia akan kehilangan kebebasan dan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya yang paling hakiki, yaitu melindungi serta mengayomi semua warga negara tanpa pembeda-bedaan.

Negara juga akan menikmati manfaat yang maksimal dari agama-agama, ketika agama-agama diberi kebebasan mengaktualisasikan jati dirinya serta melaksanakan fungsinya terhadap negara. Begitu agama terkooptasi untuk sekadar menjadi pemberi legitimasi kepada kekuasaan negara, ia kehilangan keunikannya yaitu dimensi moral dan transendentalnya.

VI. Penutup

Sudah terungkap tadi bahwa kehidupan sosial termasuk kehidupan bernegara bagi orang beriman adalah medan perwujudan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, yang disimpulkan dari imannya. Maka dalam keterlibatan sosial perlulah diusahakan suatu kerja sama yang terpadu dari agama-agama sebagai lembaga, maupun di antara para penganut agama untuk memperjuangkan keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan kesejahteraan hidup bersama. Dalam perjuangan bersama inilah terjadi dialog antar-iman yang sebenar-benarnya. Yang ditonjolkan dalam kerja sama seperti ini bukanlah bendera agama, melainkan solidaritas dan keterlibatan dalam mewujudkan hidup bersama yang adil, sejahtera dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Widyahadi Seputra, dkk. (ed.), Menggalang Persatuan Indonesia Baru, Sekretariat Komisi PSE/APP - KAJ, Jakarta, 1999
- Eddy Kristiyanto (ed.), Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- F. Budi Hardiman, Ruang Publik Politis, dalam: Kompas 4 Agustus 2004
- Politisasi Agama Percepat Eskalasi Fisik Antar-Rakyat, dalam: Kompas 7 Juni 2004
- Dialog Antaragama Harus Dibangun dalam Kesetaraan, dalam: Kompas 31 Mei 2004
-